



## PENGENDALIAN KONSUMSI BBM BERSUBSIDI DAN PENURUNAN HARGA BBM NONSUBSIDI

Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

**Dewi Wuryandani**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[dewi.wuryandani@dpr.go.id](mailto:dewi.wuryandani@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menetapkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk jenis bahan bakar tertentu (JBT), yaitu minyak tanah (kerosene) sebesar 0,5 juta kilo liter (kl) dan solar sebesar 17 juta kl. Sedangkan kuota untuk jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP/pertalite) ditetapkan sebesar 32,56 juta kl. Penambahan kuota pertalite mencapai 2,6 juta kl dari 29,91 juta kl pada 2022, di mana penambahan kuota BBM bersubsidi tersebut didasari atas realisasi penjualan pertalite pada 2022 sebesar 29,5 juta kl dan proyeksi kenaikan konsumsi di tahun 2023.

Pada saat ini pengendalian konsumsi BBM bersubsidi jenis pertalite masih dilakukan melalui aplikasi *My Pertamina*. Dalam hal pengendalian konsumsi BBM bersubsidi ini, pemerintah didorong untuk melakukan pengendaliannya sejak dini. Untuk itu diharapkan pemerintah dapat menyampaikan rencana pengendalian konsumsi pertalite dan solar melalui penyelesaian revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Perpres tersebut mengatur petunjuk teknis pembelian BBM bersubsidi, seperti kriteria pengguna kendaraan dan persyaratan detail lainnya. Hal ini bertujuan agar penyaluran pertalite dan solar akan lebih tepat sasaran karena ada persyaratan tertentu.

Kriteria pengguna pertalite yang ditentukan dari revisi Perpres No. 191 Tahun 2014 akan disinkronisasi dengan data dari *My Pertamina*. Saat ini kendaraan yang masih boleh menggunakan pertalite adalah mobil dengan mesin di bawah 1.400 *cubicle centimeter* (cc) dan motor di bawah 250 cc.

Hingga saat ini, jumlah pendaftar aplikasi *My Pertamina* hampir menembus empat juta kendaraan. Adanya penambahan kuota pertalite dari sebelumnya 29,91 juta kl pada 2022 menjadi 32,56 juta kl pada 2023, berdasarkan prediksi meningkatnya jumlah pengendara setelah dicabutnya kebijakan PPKM oleh pemerintah.

Sementara itu terkait dengan BBM nonsubsidi, harga BBM nonsubsidi yang didasari mekanisme pasar untuk mencapai harga keekonomian, mengalami penurunan. Penurunan harga BBM nonsubsidi ini merupakan imbas dari penurunan harga minyak mentah dunia. Pertamina yang awalnya Rp13.900 per liter, dipangkas menjadi Rp12.800. Kemudian Pertamina turbo dari Rp15.200 per liter turun menjadi Rp14.050. Selanjutnya, Pertamina dexlite saat ini dibanderol dengan harga Rp16.150 dari Rp18.300 per liter dan Pertamina dex menjadi Rp16.750 dari Rp18.800 per liter.

Peneliti PSE UGM, Agung Satrio Nugroho, menjelaskan penurunan harga BBM nonsubsidi tersebut memberikan dampak positif ke negara. Dengan disparitas harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi yang semakin kecil, diprediksi akan ada perpindahan konsumsi dari pertalite ke Pertamina. Perpindahan tersebut mirip ketika Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi.

Akibat disparitas harga pertamax yang semakin besar, membuat masyarakat beralih mengonsumsi pertalite sebagai BBM kendaraan. Jumlah perpindahan konsumsi tersebut mencapai 5%.

Berdasarkan data yang dihimpun ReforMiner Institute, jika dibandingkan dengan lima negara ASEAN lainnya (Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina), saat ini level harga BBM di Indonesia berada di posisi relatif moderat. Singapura tercatat sebagai negara dengan harga jual BBM paling tinggi di ASEAN dengan harga BBM RON 95 di kisaran Rp30.000 per liter. Sementara Malaysia menjadi negara yang menjual BBM dengan harga relatif paling rendah di ASEAN dengan kisaran Rp8.000 per liter.

Penurunan harga BBM nonsubsidi ini penting untuk membangun persepsi positif terhadap kebijakan harga BBM di dalam negeri. Pasalnya, pemerintah dinilai cenderung lebih responsif ketika mengumumkan harga BBM naik dan cenderung menunda ketika harus menurunkan harga BBM. Kebijakan tersebut dapat mengurangi persepsi negatif terhadap badan usaha niaga BBM yang sering dinilai kurang adil.

## Atensi DPR

Pemerintah diharapkan dapat segera menyelesaikan revisi Perpres No. 191 Tahun 2014 dan menyampaikan rencana pengendalian konsumsi pertalite dan solar. Di samping itu, penurunan harga BBM nonsubsidi yang membuat disparitas harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi semakin kecil, juga diharapkan dapat membuat sebagian masyarakat beralih untuk menggunakan BBM nonsubsidi sehingga dapat mengurangi beban subsidi. Komisi VII DPR RI perlu melakukan pengawasan terkait dengan rencana atau upaya pemerintah melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dalam revisi Perpres No. 191 Tahun 2014. Selain itu, Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah agar mempertimbangkan kebijakan *automatic price adjustment* untuk BBM yang disubsidi untuk mengurangi risiko kenaikan subsidi di APBN.

## Sumber

Media Indonesia, 9 Januari 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official



## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Riyadi Santoso  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyantri

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.